



GAPKI

NEWS

MENGGAPAI
KEMANDIRIAN ENERGI

DENGAN B50



Bahan Bakar Merdeka

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga buletin *GAPKI News* edisi Agustus 2026 dapat kami terbitkan. Kami juga bersyukur karena media informasi ini sudah dapat dinikmati informasi dan kontennya.

Agustus adalah bulan penuh semangat karena kemerdekaan Indonesia diraih pada bulan bersejarah ini 81 tahun silam. Spirit untuk merdeka menjadi energi besar bagi industri sawit setelah mandatori B50 diberlakukan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini menandai fase penting, yakni Indonesia berhenti mengimpor solar. Kebutuhan bahan bakar minyak dapat dipenuhi dari pencampuran 50% minyak sawit dan solar produksi dalam negeri. Oleh karena itu, B50 bolehlah kita sebut sebagai bahan bakar merdeka.

Penerapan B50 dan dampaknya terhadap harga tandan buah segar (TBS) menjadi laporan utama *GAPKI News* edisi ini. Harapan kita keseimbangan antara konsumsi dalam negeri dan ekspor tercapai dengan peningkatan produksi sawit. Oleh karena itu, GAPKI menawarkan berbagai terobosan antara lain pengembangan riset, mekanisasi operasional kebun, dan lain-lainnya. Gagasan ini menjadi bagian dari materi laporan media kita ini.

Selain itu, kita patut bersyukur karena GAPKI cabang menunjukkan eksistensinya sehingga kontribusinya semakin terasa. Informasi lainnya adalah langkah GAPKI yang meningkatkan diplomasi dagang di negara-negara yang selama ini menjadi pasar ekspor minyak sawit dari Indonesia. Semoga sajian dan informasi buletin ini memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat membaca. ■

Salam,
Redaksi GAPKI News

GAPKI News

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT
GAPKI Pusat

PEMBINA
Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH
Mukti Sardjono

TIM AHLI
Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB
Bandung Sahari

Dewan Redaksi
Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Mochamad Husni
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT
Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



Memperkuat Kemitraan, Meningkatkan Daya Saing.....10,11

Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Persediaan CPO Akhir Mei 2026 Meningkat.....	4
GAPKI Perkuat Kemitraan dengan Industri Minyak Nabati Rusia.....	5
Menggapai Kemandirian Energi dengan B50.....	6,7
Pentingnya Keseragaman Harga Acuan Minyak Sawit.....	8
GAPKI Memperkuat Diplomasi Dagang di China.....	9



Menciptakan Tempat Kerja Inklusif
dengan Komite Gender.....12



Mengolah Limbah Cair PKS
Menjadi Pupuk Organik.....13

Mempercepat Inovasi dengan Konsorsium Riset	14,15
Sawit Membutuhkan Ekosistem Riset Berkelanjutan.....	16
Perlindungan Pekerja Kunci Keberlanjutan Industri Sawit.....	17
Saatnya, Kreator Konten Muda Bicara Sawit.....	18
Memperkuat Pencegahan Karhutla di Lahan Gambut	19
Minyak Sawit untuk Medis Mendapatkan Pengecualian EUDR.....	20
Menyiapkan Keterampilan Pekerja untuk Transformasi Ekonomi.....	21
GAPKI Kalbar Pertegas Dukungan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional.....	22
GAPKI Sulawesi Inisiasi Peningkatan Kualitas SDM Sawit.....	23
GAPKI Bengkulu Perkuat Konsolidasi Organisasi.....	24

PERSEDIAAN CPO AKHIR MEI 2026 MENINGKAT

Penurunan konsumsi dan ekspor lebih besar dibandingkan produksi selama Mei 2026

Persediaan minyak sawit pada akhir Mei 2026 meningkat menjadi 3,042 juta ton, lebih tinggi dibandingkan stok akhir April 2026 sebesar 2,558 juta ton. Peningkatan ini terjadi di tengah penurunan produksi, tetapi penurunan konsumsi dan ekspor lebih besar. Produksi CPO pada Mei 2026 sebesar 4,165 juta ton, turun dibandingkan April 2026 sebesar 4,479 juta ton. Produksi PKO turun dari 424 ribu ton pada April 2026 menjadi 387 ribu ton pada Mei 2026.

Total produksi CPO dan PKO pada Mei 2026 mencapai 4,552 juta ton atau turun 7,16% dibandingkan produksi April 2026. Sedangkan secara kumulatif, produksi pada Januari-Mei 2026 mencapai 25,013 juta ton, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 22,600 juta ton. Pada Mei 2026, total konsumsi dalam negeri adalah 2,078 juta ton atau turun 2,98% dibandingkan April sebesar 2.141 ribu ton.

Penurunan konsumsi terjadi pada biodiesel sebesar 1,035 juta ton dari 1,136 juta ton pada April 2026. Konsumsi pangan naik menjadi 856

ribu ton dari 831 ribu ton pada April 2026. Begitu juga dengan konsumsi oleokimia yang naik menjadi 187 ribu ton dari 173 ribu ton pada April 2026. Secara kumulatif, total konsumsi dalam negeri Januari-Mei 2026 mencapai 10,743 juta ton, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2025 sebesar 10,200 juta ton.

Total ekspor produk sawit pada Mei 2026 adalah 1,996 juta ton, lebih rendah dibandingkan April sebesar 2,777 juta ton. Penurunan terjadi pada ekspor olahan minyak sawit sebesar 1,423 juta ton dari 2,041 juta ton. Ekspor CPO menjadi 31 ribu ton dari semula 153 ribu ton, dan ekspor olahan minyak inti sawit menjadi 55 ribu ton dari 97 ribu ton. Tetapi, secara kumulatif, total ekspor Januari-Mei 2026 mencapai 13,320 juta ton, lebih tinggi daripada ekspor periode yang sama tahun 2025 sebesar 12,080 juta ton.

Nilai ekspor produk sawit pada Mei 2026 adalah US\$ 2,49 miliar, turun dari US\$ 3,38 miliar pada April 2026. Rata-rata harga CPO CIF Rotterdam pada Mei adalah US\$ 1.453/ton, lebih rendah dari harga rata-rata April sebesar US\$ 1.566. Secara kumulatif,

nilai ekspor Januari-Mei 2026 adalah US\$ 15,526 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sebesar \$ 13,641 miliar. Rata-rata harga CPO Cif Rotterdam pada Januari-Mei 2026 adalah US\$ 1.417 per ton, lebih tinggi daripada rata-rata periode yang sama tahun 2025 sebesar US\$ 1.186 per ton.

Direktur Eksekutif Mukti Sardjono mengatakan, penurunan ekspor pada April 2026 terjadi untuk negara tujuan China sebesar 164 ribu ton, India 124 ribu ton, Afrika 140 ribu ton, Uni Eropa 26 ribu ton, Amerika Serikat 78 ribu ton, dan Malaysia 49 ribu ton. Kenaikan ekspor terjadi untuk tujuan Rusia sebesar 86 ribu ton.

Namun apabila dihitung secara kumulatif selama Januari-Mei 2026, ekspor ke China lebih tinggi 46% dibandingkan tahun 2025, India lebih tinggi 3%, Afrika lebih tinggi 14%, Uni Eropa lebih tinggi 3%. Sedangkan untuk tujuan Amerika Serikat justru turun 8% dibandingkan tahun 2025.

Dengan stok awal tahun sebesar 2,068 juta ton, total produksi Januari-Mei 2026 sebesar 25,013 juta ton, total konsumsi dalam negeri 10,743 juta ton, total ekspor 13,320 juta ton, dan impor 24 ribu ton, maka stok akhir Mei 2026 tercatat sebesar 3,42 juta ribu ton. ■



GAPKI PERKUAT KEMITRAAN DENGAN INDUSTRI MINYAK NABATI RUSIA

Rusia merupakan salah satu pasar strategis bagi ekspor minyak sawit Indonesia.

GAPKI memperkuat kemitraan jangka panjang dengan industri minyak nabati Rusia dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* bersama The Fat and Oil Union of Russia dan Association of Enterprises of Fat and Oil Industry of the Eurasian Economic Union (EAEU). Penandatanganan yang diadakan di Moskow pada 10 Juli 2026 ini dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, Jose Antonio Morato Tavares, Atase Perdagangan KBRI Moskow, pejabat KBRI Moskow, dan perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

"Kami meyakini kolaborasi yang lebih erat akan membuka peluang perdagangan, investasi, inovasi yang lebih besar, dan memperluas akses pasar serta memperkuat daya saing industri minyak nabati kedua negara," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Peningkatan kerja sama perdagangan dilakukan melalui pertukaran informasi, pengembangan jejaring bisnis yang berkelanjutan, promosi bersama, serta perluasan akses pasar bagi minyak sawit dan produk turunannya.

Sebelum GAPKI menandatangani MoU ini, pemerintah Indonesia dan negara anggota EAEU telah menandatangani *Free Trade Agreement (FTA)* di St. Petersburg, 21 Desember 2025. Melalui FTA ini, negara anggota EAEU akan menghapus atau menurunkan tarif untuk lebih dari 90 persen kategori produk asal Indonesia. Negara anggota EAEU terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kirgistan. Kesepakatan ini membuka peluang lebih besar bagi ekspor minyak sawit dan produk turunannya ke kawasan Eurasia.

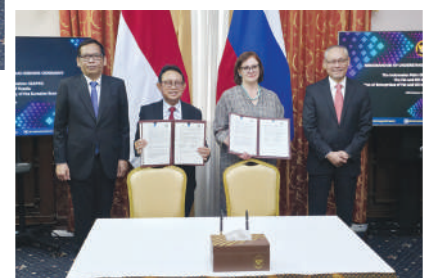
Nota kesepahaman antara GAPKI dan The Fat and Oil Union of Russia



merupakan langkah konkret di tingkat pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang yang dihadirkan FTA. Kerja sama dalam MoU mencakup pertukaran pengetahuan, berbagi informasi tentang industri terkini, dan membentuk kelompok kerja bersama terkait isu strategis. Kerja sama ini juga mencakup seminar, promosi investasi, pengembangan teknologi dan inovasi, memperkuat kolaborasi dalam advokasi kebijakan dan lain-lainnya.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan kesepakatan ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan hubungan kelembagaan sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara pelaku industri kedua negara. Rusia merupakan salah satu pasar strategis bagi ekspor minyak sawit Indonesia meskipun volumenya masih di bawah China, India, dan Pakistan. Berdasarkan data GAPKI, ekspor produk sawit Indonesia ke Rusia didominasi oleh *Refined Palm Oil (RBD Palm Oil)*, *Refined Palm Kernel Oil (RBD PKO)*, dan oleokimia.

Pada tahun 2025, ekspor *Refined Palm Oil* mencapai 689 ribu ton dengan nilai USD 726 juta, *Refined PKO* sebesar 81 ribu ton senilai USD 159 juta, dan produk oleokimia 23 ribu ton senilai USD 34 juta. Total ekspor produk sawit Indonesia ke Rusia tahun 2025 mencapai 792 ribu ton dengan nilai USD 919 juta, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 680 ribu ton senilai USD 681 juta. Hingga April 2026, ekspor telah mencapai 189 ribu ton dengan



nilai USD 237 juta.

Selain penandatanganan MoU, GAPKI berpartisipasi dalam INNOPROM (Innovations and Industrial Promotion) 2026 yang diadakan di Yekaterinburg, Rusia, 8 Juli 2026. Pameran ini mempertemukan pemerintah, para pelaku usaha, investor, dan asosiasi industri dari berbagai negara. Dalam forum *Palm Oil and the Future of Sustainable Energy: Balancing Climate Goals, Energy Security and Economic Development*, Kabid Hubungan Luar Negeri GAPKI, Fadhil Hasan memaparkan materi berjudul *Sustainable Palm Oil: Strengthening Global Energy Security and Industrial Competitiveness*.

Fadhil Hasan menegaskan peran strategis minyak sawit sebagai bagian dari solusi transisi energi global dan penggerak daya saing industri serta ketahanan energi. Oleh karena itu, Indonesia terus memperkuat tata kelola keberlanjutan melalui pengembangan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kini diperluas hingga mencakup sektor hilir dan bioenergi, dengan penguatan *traceability*, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan. ■

MENGGAPAI KEMANDIRIAN ENERGI DENGAN B50

Dengan implementasi B50 Indonesia berhenti mengimpor bahan bakar solar.



Bahan bakar minyak solar dengan campuran 50% minyak sawit atau Biodiesel (B50) akhirnya diberlakukan mulai 1 Juli 2026. Peresmian B50 dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di SPBU Pertamina, Rest Area KM 57, Tol Jakarta-Cikampek di Karawang, 10 Juli 2026. Acara ini dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Dengan peresmian ini Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B50. Mandatori B50 merupakan agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan mengimpor solar lagi setelah B50 diterapkan. Selain itu, program campuran bahan bakar solar dengan minyak sawit bertujuan memperkuat

nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan kedaulatan energi Indonesia.

"Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat sendiri," kata Presiden Prabowo. Program B50 dinilai sebagai tonggak penting dalam perjalanan kemandirian energi. Masalah energi dan pangan merupakan sumber kekuatan suatu bangsa. Karena itu, Indonesia menargetkan swasembada pangan dan kemandirian energi sebagai strategi menuju masa depan. Program biodiesel dirilis pada tahun 2006 dan dimulai dengan mencampur solar dengan 2,5% minyak sawit pada tahun 2008. Secara bertahap campuran CPO ditingkatkan hingga 50% pada tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan mandatori B50 menghemat devisa negara hingga Rp 170 triliun, naik dari Rp 133,3 triliun pada penerapan kebijakan B40. "Dengan B50 kita tidak impor solar

lagi," katanya. Dengan peningkatan dari B40 menjadi B50 terdapat tambahan pendapatan dari industri CPO menjadi Rp 23,49 triliun dari Rp 20,92 triliun pada B40. Selain itu, penyerapan tenaga kerja naik menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50 serta terjadi penurunan emisi gas CO₂.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono peningkatan kadar campuran minyak sawit dari 40% menjadi 50% secara otomatis meningkatkan kebutuhan *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) sebagai bahan baku utama biodiesel. Mandatori B50 membutuhkan pasokan minyak sawit mentah sekitar 16 juta ton hingga 18,69 juta ton per tahun. Dengan pemberlakuan B50 per 1 Juli 2026, dibutuhkan tambahan sekitar 1,7 juta ton CPO hingga akhir tahun 2026. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya dibutuhkan tambahan sekitar 3,5 juta ton CPO.

Untuk bahan baku implementasi B50 hingga akhir tahun 2026, GAPKI memastikan produksi CPO nasional masih mencukupi untuk mendukung B50. Tambahan kebutuhan 1,7 juta ton masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. "Seharusnya tahun ini

produksi cukup untuk mendukung B50,” katanya.

Mandatori B50 dijalankan secara bertahap hingga bulan ini untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersisa. Campuran CPO hingga 50% sudah pasti meningkatkan kebutuhan FAME yang berdampak langsung pada meningkatnya konsumsi minyak sawit dalam negeri. Selain itu, peningkatan kebutuhan domestik ini memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi industri hilir sawit secara keseluruhan. Di sisi yang lain, tambahan kebutuhan dalam negeri juga berpengaruh terhadap ekspor karena produksi sawit dalam lima tahun ini stagnan.

Potensi Kenaikan Harga TBS

Berdasarkan data GAPKI, produksi minyak sawit sepanjang periode 2021-2025 berada di kisaran 48-52 juta ton per tahun. Contohnya, pada 2025 produksi CPO sebanyak 51,66 juta ton atau tumbuh 7,26 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2024. Total ekspor CPO dan produk turunannya pada tahun 2025 mencapai 32,34 juta ton yang terdiri dari minyak sawit olahan, CPO, dan oleokimia. Program B50 diperkirakan mengalihkan 13-20 juta ton dari pasar ekspor ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, mengatakan sampai saat ini pasar biodiesel Indonesia masih sangat bergantung pada kebijakan mandatori pemerintah. Program wajib pencampuran bahan bakar solar dengan minyak sawit adalah faktor utama yang mendorong permintaan bahan bakar nabati di pasar domestik. Karena itu, besarnya serapan pasar dalam negeri juga dipengaruhi oleh campuran minyak sawit sesuai ketentuan pemerintah. Kondisi ini berbeda dibandingkan volume untuk ekspor yang ditentukan oleh mekanisme pasar.

Dari perspektif pasar, pengalihan volume jutaan ton CPO tentunya berpotensi mengurangi ketersediaan minyak sawit di pasar global. Harga minyak sawit menguat apabila produksi minyak kedelai, bunga matahari atau *rapeseed* yang menjadi kompetitor minyak sawit tidak

mengalami peningkatan signifikan. Apalagi ketika permintaan pasar tengah meningkat seperti sekarang. Kondisi ini diharapkan menjadi sentimen positif bagi peningkatan harga CPO Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan harga TBS di tingkat petani.

Selama ini, harga minyak sawit dunia menjadi salah satu parameter dalam penentuan harga CPO domestik. Harga CPO dunia dikombinasikan dengan parameter lainnya seperti harga CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan Bursa CPO Indonesia. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah biaya asuransi, biaya pengiriman, dan biaya lainnya. Karena itu, kenaikan harga CPO dunia diharapkan menjadi faktor penopang harga CPO dalam negeri sehingga berpeluang memberi keuntungan bagi pelaku industri sawit maupun petani.

Implementasi B50 memang menumbuhkan optimisme para pemangku kepentingan sawit secara keseluruhan. Meski demikian, GAPKI menyatakan faktor lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yakni kebijakan pungutan ekspor. “Kebijakan pungutan ekspor tetap menjadi faktor krusial,” katanya. Selama ini, pungutan ekspor CPO dipakai untuk membiayai hilirisasi, insentif biodiesel, peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana, riset, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor sawit.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin mengatakan penurunan ekspor berpotensi mengurangi penerimaan dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor. Hal ini diharapkan tidak menjadi penghalang program yang berkaitan dengan petani antara lain peremajaan sawit rakyat maupun peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu, pungutan ekspor minyak sawit sebesar 12,5% per ton diharapkan tidak menekan harga hasil panen petani. Karena itu, diperlukan sumber pendanaan baru untuk mengantisipasi penurunan pendapatan dari pungutan ekspor akibat penurunan volume ekspor.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy

Martono, ketersediaan minyak sawit di pasar global yang terbatas akibat pengurangan ekspor dari Indonesia sebaiknya dibarengi dengan pungutan ekspor yang tidak naik. “Kalau pungutan ekspor berkurang lalu dinaikkan lagi, maka akan menekan harga CPO dalam negeri dan juga harga TBS petani,” katanya. Karena itu, keberhasilan B50 dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah, khususnya terkait pungutan ekspor dan pengelolaan dana sawit. ■

Jalan Panjang BBM Berbasis Minyak Sawit

2006

Inpres No. Tahun 2006 tentang pemanfaatan bahan bakar nabati.

2008

Implementasi mandatori biodiesel 2,5% (B2,5)

1 September 2013

Peningkatan mandatori biodiesel menjadi 10% (B10).

23 Maret 2015

Peresmian mandatori biodiesel 15% (B15).

31 Agustus 2018

Peningkatan mandatori biodiesel 20% (B20).

23 Desember 2019

Perluasan mandatori biodiesel 30% (B30)

1 Februari 2023

Peningkatan mandatori biodiesel 35% (B35)

1 Januari 2025

Implementasi mandatori biodiesel 40% (B40)



PENTINGNYA KESERAGAMAN HARGA ACUAN MINYAK SAWIT

Harga acuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan otoritas pengawasan.

Sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia belum memiliki harga acuan (*benchmark*) yang seragam sebagai referensi bersama dalam menilai kewajaran harga transaksi ekspor. Selama ini, harga yang digunakan merupakan kombinasi dari harga CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan Bursa CPO Indonesia. Tetapi, harga ini belum dapat digunakan sebagai acuan tunggal setiap transaksi. Padahal, harga acuan bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan otoritas dalam melakukan pengawasan.

"Harga sawit di Indonesia agak pelik karena belum ada *benchmark* harga yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan bersama," kata Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI Yustinus Lambang Setyo Putro. Hal ini disampaikan dalam diskusi *Ruang Gagasan IKPI: Tempat Bertemunya Pemikiran dan Kebijakan Fiskal* yang diadakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta, 26 Juni 2026. Belum adanya harga acuan menyebabkan perbedaan penafsiran dalam pemeriksaan perpajakan maupun kepabean.

Otoritas pengawasan menggunakan kombinasi harga CIF Rotterdam, MPOB, dan Bursa CPO Indonesia sebagai acuan. Sedangkan pelaku usaha biasanya



menggunakan referensi harga harian MPOB dikurangi biaya angkut dan asuransi sehingga diperoleh harga di pabrik. "Ini yang menjadi salah satu dasar menentukan harga transaksi," katanya. Sedangkan untuk menentukan apakah suatu harga sesuai dengan nilai pasar harus memperhatikan karakteristik transaksi yang berbeda-beda.

Dalam kesempatan terpisah, guru besar IPB University, Sudarsono Soedomo mengatakan perbedaan harga dalam perdagangan komoditas tidak selalu menunjukkan pelanggaran hukum. Harga referensi seperti Malaysian Palm Oil Price adalah patokan dasar. Sedangkan harga transaksi riil selalu berbeda karena faktor komersial yang sah seperti perbedaan *Incoterms* (*International Commercial Terms*), spesifikasi kualitas, dan termin pembayaran.

Oleh karena itu, acuan harga yang disepakati bersama sangat penting untuk menghindari beda penafsiran.

Transaksi harus mencerminkan volume barang sesungguhnya sesuai dengan volume yang dilaporkan. Faktor lainnya adalah barang yang diekspor harus sesuai dengan yang dilaporkan dan tidak mengubah jenis barang. "Aspek-aspek ini yang mendasar dalam ekspor komoditas," kata Yustinus. Yustinus

mengatakan proses ekspor komoditas sawit diawasi melalui berbagai tahapan yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah. Proses ini dimulai dari persetujuan ekspor melalui *Indonesia National Single Window* (INSW) yang dilanjutkan pemeriksaan dokumen melalui Sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses berikutnya adalah pemeriksaan fisik barang untuk jalur tertentu dan pemantauan devisa hasil ekspor melalui sistem SIMODIS Bank Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menilai kewajaran transaksi ekspor.

Selain harus memenuhi kewajiban perpajakan, eksportir komoditas sawit juga diwajibkan memenuhi sejumlah kewajiban lainnya sebelum dapat mengekspor produk. Beberapa kewajiban itu antar alain Bea Keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pungutan Ekspor kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk memperoleh kuota ekspor.

"Sistem pengawasan di Indonesia sudah sangat ketat. Mekanismenya sudah tersedia. Yang perlu kita lakukan adalah *law enforcement*," kata Yustinus. Dia berharap pengawasan yang telah dibangun berbagai instansi terus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten. Dengan penegakan hukum ini iklim usaha tetap terjaga sehingga industri sawit berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara. "GAPKI selalu mendorong anggota mematuhi ketentuan perpajakan dan perdagangan yang berlaku," katanya. ■



GAPKI MEMPERKUAT DIPLOMASI DAGANG DI CHINA

**China menyerap
15% dari total ekspor
sawit nasional yang
menjadikannya mitra
strategis.**

China merupakan pasar penting bagi minyak sawit Indonesia karena volume permintaannya terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, ekspor minyak sawit Indonesia ke negeri Tirai Bambu ini mencapai 4,03 juta ton atau senilai USD 4,4 miliar. China menyerap sekitar 15% dari total ekspor sawit nasional yang menjadikannya mitra strategis. Oleh karena itu, GAPKI tidak pernah berhenti memperkuat diplomasi dagang melalui berbagai terobosan, salah satunya menjadi narasumber dalam sejumlah konferensi dan pameran dagang.

Sepanjang Juli 2026, GAPKI menjadi narasumber dalam dua kegiatan sekaligus. Pertama, dalam *The 17th China International Cereals and Oils Conference (CICOC)* yang diadakan oleh The China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce (CFNA) di Shanghai pada 2 Juli 2026. Konferensi ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari industri sereal dan minyak nabati. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan mempresentasikan materi tentang *Indonesian Palm Oil*



Performance and Policy Update.

Kegiatan kedua yang dihadiri GAPKI adalah *The 23rd Global Oleochem Summit 2026* di Kunming, China pada 25 Juli 2025. Wakil Sekretaris Jenderal GAPKI, Lolita Bangun menjadi narasumber untuk memaparkan industri sawit di Indonesia, terutama setelah mandatori B50 diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Sebagai importir penting CPO Indonesia, China berharap pasokan CPO tetap aman sehingga kebutuhan terhadap minyak nabati terpenuhi.

Untuk itu, Indonesia berusaha meningkatkan produktivitas sawit melalui berbagai program seperti peremajaan sawit rakyat, pelepasan serangga penyerbuk, hingga distribusi sumber daya genetik terbaru.

Konferensi CICOC membahas beberapa topik utama antara lain tren perdagangan dan kebijakan global untuk industri sereal dan minyak nabati, keberlanjutan dan ketahanan rantai pasoknya. Termasuk di dalamnya adalah *green supply chain, traceability*, dan perkembangan pasar minyak nabati internasional. Dalam sesi *Global Palm Oil Industry*, M. Fadhil Hasan menjelaskan kinerja industri kelapa sawit Indonesia dan sejumlah

kebijakan terbaru yang mempengaruhi daya saing. “Ada berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing minyak sawit,” katanya.

Pembahasan tentang minyak sawit juga mencakup keberlanjutan industri sawit di Indonesia, perdagangan hingga prospek industri sawit di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perdagangan minyak nabati, minyak sawit berperan penting. Sebab, minyak sawit berkontribusi hingga 44% dari total pasokan minyak nabati dunia.

Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan langsung dengan sawit akan berpengaruh terhadap daya saing CPO di pasar global. “Indonesia diharapkan memperkuat perannya sebagai pemasok utama minyak sawit dunia,” katanya.

Selain menjadi pemasok utama CPO, Indonesia juga diharapkan mengembangkan rantai pasok yang berdaya saing dan berkelanjutan. Penguatan rantai pasok menjadikan distribusi minyak sawit lebih efektif dan efisien sehingga daya saing tetap terjaga. Sampai saat ini, minyak sawit memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya. Salah satu keunggulan minyak sawit adalah harga yang kompetitif. ■



MEMPERKUAT KEMITRAAN, MENINGKATKAN DAYA SAING

Kemitraan ini merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi sawit nasional.



Perembangan industri sawit nasional tidak dapat dilepaskan dari kemitraan inti-plasma yang dijalankan sejak tahun 1980-an. Kolaborasi antara perusahaan dan petani ini menjadi fondasi industri sawit sehingga Indonesia menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan hadirnya berbagai faktor membuat kemitraan perusahaan dan petani menurun. Kemitraan antara perusahaan dengan petani swadaya bahkan sempat terhenti. Padahal, kemitraan ini merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi sawit nasional.

"Kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit itu menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan perkebunan mandiri," kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono. Pandangan ini disampaikan dalam dialog sawit bertajuk *Memperkuat Kemitraan Inti dan Plasma* yang diadakan oleh Asosiasi Petani

Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia di Pekanbaru pada 1 Juli 2026. Acara ini sekaligus peluncuran buku berjudul Setiyono: *Kisah dan Rahasia Sukses Petani Sawit Plasma Transmigrasi*.

Dialog sawit ini dihadiri sejumlah narasumber antara lain Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), PTPN IV PalmCo, GAPKI, Pemerintah Provinsi Riau, dan ASPEKPIR. Kegiatan ini berfokus membahas isu-isu strategis mulai dari penguatan kemitraan inti-plasma, transformasi sektor perkebunan, keberlanjutan industri sawit, hingga peningkatan kesejahteraan petani.

Kemitraan perusahaan dan petani sawit berakar pada keputusan Menteri Pertanian tahun 1977. Kewajiban kemitraan kemudian diperbarui lewat Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemitraan ini kemudian menghadapi tantangan tentang

perluasan lahan akibat kebijakan moratorium melalui Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Moratorium Pembukaan Areal Kebun Sawit Baru. Keterbatasan lahan baru ini menjadi salah satu faktor menurunnya model kemitraan.

Menurut Mukti, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali model kemitraan dengan petani sawit swadaya. "Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat menjadi ajang untuk kemitraan baru bagi pekebun swadaya dan perusahaan," katanya. Program PSR yang dijalankan pemerintah sejak tahun 2017 dapat menjadi langkah penting bermitra kembali bagi kemitraan yang telah bubar. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sawit rakyat sehingga berdampak pada produksi nasional serta kesejahteraan petani atau pekebun.

Lebih lanjut dia mengatakan kemitraan bukan sekadar hubungan bisnis antara perusahaan dan

pekebun. Kemitraan dibangun melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, mulai dari koperasi, perusahaan, pemerintah daerah dan pusat. "Petani perlu pendampingan yang didukung oleh pendanaan yang memadai," katanya. Dengan pendampingan petani ini, *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dapat terlaksana dengan optimal serta kemitraan berjalan secara berkeadilan dan berkesinambungan.

Selain itu, pelaksanaan kemitraan juga membutuhkan dukungan teknologi dan digitalisasi sehingga kemitraan berjalan transparan. Teknologi dapat mendorong transparansi dalam aspek bahan tanaman, uji rendemen secara berkala, sampai umur tanaman. Kebutuhan terhadap teknologi dan digitalisasi tidak mungkin dipenuhi sendiri oleh petani. Di sinilah peran perusahaan sawit dalam kemitraan dengan petani. GAPKI telah menyusun panduan kemitraan bagi anggota, termasuk penguatan kelembagaan petani sawit serta menjalankan kolaborasi multipihak, yakni inti-plasma, pemerintah, dan lembaga keuangan.

GAPKI memiliki kemitraan dengan petani melalui kelembagaan petani mulai dari asosiasi, koperasi, maupun serikat pekebun sawit. Bahkan, GAPKI mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui jalur kemitraan. Jalur kemitraan melalui koperasi ini sudah dilakukan di Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jambi, dan Riau. Tujuannya antara lain mendukung pencapaian target peremajaan sawit rakyat yang berkontribusi signifikan terhadap tingkat produksi sawit nasional.

Menurut Perancang Peraturan Ahli Madya Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Togu Saragih, hubungan kemitraan akan menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan. Sebab, perusahaan memberikan pembinaan, pendampingan, serta akses pasar kepada pekebun. Selain itu, harga hasil panen sudah ditetapkan melalui perjanjian kontrak. "Dengan pola ini harga panen sawit lebih stabil



lantaran adanya pembinaan dan pendampingan dari perusahaan untuk menghasilkan produksi yang bagus," katanya.

Kepastian harga hasil panen petani menjadi faktor penting dalam kemitraan karena dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berkaca pada penurunan harga tandan buah segar beberapa waktu yang lalu, ternyata banyak dialami oleh petani swadaya. Kepastian harga hasil panen ini berbeda dibandingkan milik petani yang sudah bermitra dengan perusahaan. Harga tandan buah segar relatif lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasar.

Keunggulan model kemitraan juga disampaikan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyudha. Selain ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun, kemitraan juga diarahkan untuk mendorong penerapan praktik budidaya yang baik, pemenuhan aspek lingkungan dan sosial, serta percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Oleh karena itu, PalmCo berencana memperluas kemitraan dengan koperasi, pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat pola kemitraan.

Sementara itu, Ketua Umum

ASPEKPIR Indonesia Setiyono kelembagaan petani sawit harus diperkuat untuk mendukung kemitraan yang berkeadilan. Sebab, kemitraan dengan perusahaan tidak mungkin dilakukan secara perorangan oleh masing-masing petani sawit. Kelembagaan petani melalui koperasi akan melahirkan kemitraan yang solid. Oleh karena itu, berbagai gagasan dalam pengembangan kelembagaan petani dan penguatan kemitraan perlu dikaji bersama untuk mendapatkan masukan yang terbaik.

Berdasarkan pengalaman sebagai petani dan ketua koperasi, Setiyono menegaskan peran penting kemitraan petani dan perusahaan dalam industri sawit nasional. "Perkembangan industri sawit di Indonesia tidak akan seperti sekarang kalau tidak ada model kemitraan," katanya. Dia memulai profesi sebagai petani sawit dalam program transmigrasi pada pertengahan tahun 1980-an di Riau.

Setiyono berharap dialog sawit ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun industri sawit Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dia yakin industri sawit semakin berdaya saing, inklusif, serta berkelanjutan. "Kemitraan menjadi faktor penting pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung kemajuan petani sawit plasma," katanya. ■

MENCIPTAKAN TEMPAT KERJA INKLUSIF DENGAN KOMITE GENDER

Tempat kerja yang inklusif dan responsif gender memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja.

Sebagai daerah penghasil sawit, GAPKI Cabang Kalimantan Timur berkomitmen menciptakan tempat kerja yang inklusif dan responsif gender untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja. Penguatan komitmen dilakukan melalui *Pelatihan Penguatan Komite Gender di Industri Kelapa Sawit untuk Mewujudkan Tempat Kerja yang Aman, Setara, Inklusif, dan Berkelanjutan* di Kabupaten Paser pada 20-21 Juli 2026. Pelatihan yang diikuti oleh 30 orang perwakilan anggota GAPKI Kaltim ini merupakan hasil kerja sama antara GAPKI Kaltim dan Federasi Serikat Pekerja Hukatan yang didukung oleh Solidaridad

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari program POWERRR (*Promoting Women's Rights for Resilient and Responsible Agricultural Supply Chains*). Program ini bertujuan menciptakan model kerja inklusif yang menjunjung kesetaraan gender, perlindungan pekerja perempuan di seluruh rantai pasok industri sawit Indonesia. Kabupaten Paser dan Kutai Timur terpilih sebagai wilayah percontohan nasional program POWERRR sejak akhir tahun lalu. Salah satu tuntutan dalam program ini adalah keberadaan Komite Gender di setiap perusahaan.

Pelatihan lanjutan ini memberikan beberapa materi sebagai bekal bagi peserta antara lain pemahaman tentang fungsi dan peranan Komite Gender. Selain itu, peserta juga dibekali dengan penyusunan program

kerja, identifikasi isu ketenagakerjaan yang dihadapi pekerja perempuan, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan di setiap perusahaan. Komite ini diharapkan menjadi forum yang memperkuat dialog sosial dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan hubungan industrial yang harmonis.

"Komite Gender bukan sekadar memenuhi aspek kepatuhan, tetapi menjadi wadah dialog sosial yang mampu menghadirkan solusi nyata," kata pengurus GAPKI Kalimantan Timur, Ibnu Darmawan. Selain menjadi forum dialog sosial antara manajemen dan serikat pekerja, Komite Gender juga diharapkan dapat mendorong penerapan kebijakan yang responsif gender. Dengan kebijakan yang mengakomodasi perspektif gender, lingkungan kerja yang aman, bebas dari diskriminasi dan pelecehan seksual dapat lebih cepat diwujudkan.

Dalam pelatihan ini, GAPKI Kalimantan Timur juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kampanye *Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan* yang diinisiasi oleh GAPKI. Kampanye ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dan memperkuat aspek sosial dalam keberlanjutan industri sawit nasional. Kehadiran Komite Gender diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan di tingkat perusahaan sehingga tercipta lingkungan kerja yang inklusif.

Dalam kesempatan yang sama,



Pelaksana Tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, Muhamad Hafidz memberikan apresiasi kepada GAPKI Kaltim atas pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi juga diberikan kepada Federasi Serikat Pekerja Hukatan dan Solidaridad. "Pemerintah Kabupaten Paser mendukung penuh pembentukan dan penguatan Komite Gender di setiap perusahaan," katanya. Komite ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja perempuan.

Ketua Umum Federasi Hukatan, Nursanna Marpaung menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pekerja dalam memastikan implementasi kebijakan yang responsif gender di perusahaan. Partisipasi pekerja dapat dilakukan dengan memperkuat komunikasi tentang persoalan yang dihadapi oleh pekerja perempuan, sehingga setiap masalah teridentifikasi sejak dini. "Masalah bisa diselesaikan melalui dialog sosial yang konstruktif," katanya. ■



MENGOLAH LIMBAH CAIR PKS MENJADI PUPUK ORGANIK

“Selain menjadi pupuk, pengolahan limbah cair juga menjadi parameter penilaian PROPER.”

Pengolahan limbah cair hasil pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit merupakan tantangan serius bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Dari satu ton tandan buah segar (TBS) yang diolah akan menghasilkan 600 - 700 liter POME (*Palm Oil Mill Effluent*). Apabila pengolahan POME tidak benar, limbah ini membahayakan lingkungan. Tetapi, jika limbah di kolam ini dikelola dengan benar akan memberikan berbagai manfaat. Salah satunya menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomis. Untuk itu, dibutuhkan dukungan teknologi.

“Selain menjadi pupuk, pengolahan limbah cair juga menjadi parameter penilaian PROPER,” kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dalam Ngobrol Bareng GAPKI di Jakarta pada 19 Juli 2026. Diskusi yang mengangkat tema *Solusi Pemanfaatan Teknologi di Kolam Limbah PKS* ini menghadirkan praktisi bisnis Kardi Maryono dan Direktur Utama PT Tragloindo Utama Alexander Angwiranata sebagai narasumber.

Menurut Kardi Maryono, selama ini pengolahan limbah di kolam PKS menggunakan metode methane capture atau aerasi mekanis untuk menurunkan kadar BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*). Limbah yang telah diproses dapat digunakan untuk aplikasi lahan. Dari beberapa uji coba,



Solusi Pemanfaatan Teknologi Di Kolam Limbah PKS

aplikasi pupuk organik yang berasal dari limbah cair pengolahan sawit memberikan dampak positif. Namun, ada satu tantangan besar yakni membersihkan sedimen dari dasar kolam.

Pembersihan kolam dengan menggunakan alat berat membutuhkan biaya mahal, sekitar Rp 500-700 juta per kolam. Kalau satu PKS memiliki 10 kolam, total biaya yang dibutuhkan Rp 5-7 miliar. Biaya ini hanya untuk membersihkan kolam, namun belum termasuk biaya pengolahan limbahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi yang dapat mengolah limbah cair yang lebih efisien sekaligus menghasilkan nilai tambah. “Teknologi pengolahan limbah ini sudah semakin berkembang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Alexander Angwiranata menjelaskan bahwa teknologi yang dikembangkan oleh Tragloindo memungkinkan pengolahan limbah secara lebih efisien. Proses ini dimulai sejak limbah masih di dalam kolam. Limbah diolah dengan mesin khusus hingga memiliki kekeringan semi-basah sekitar 75%. Selanjutnya limbah ditempatkan di tempat khusus untuk difermentasi bersama cacahan tandan kosong kelapa sawit. Ukuran cacahan sekitar 4-5 sentimeter.

Proses fermentasi limbah cair dan

cacahan tandan kosong membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari. Selama masa fermentasi juga dilakukan pembalikan apabila diperlukan. Pembalikan dilakukan apabila kelembapan tidak merata. Hasil fermentasi bertekstur gembur. Apabila masih ada tandan kosong yang belum benar-benar hancur dapat dicincang menggunakan *vertical crusher*. “Hasil akhirnya berbentuk tepuk halus,” katanya. Bahan ini yang diproses menjadi pupuk organik berbentuk kasaran, serbuk atau pelet.

Menurut Alexander Angwiranata, mengubah limbah cair PKS menjadi pupuk organik akan memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, POME menjadi produk penyubur tanah yang bernilai ekonomis. Kedua, masalah limbah terselesaikan sekaligus memenuhi persyaratan penilaian PROPER. Fasilitas pengolahan POME hingga menjadi pupuk dapat dilakukan di bagian belakang pabrik kelapa sawit. “PKS tampak dari depan, sedangkan gudang tempat pupuk dari POME di bagian belakang,” katanya.

Pengolahan limbah cair PKS yang selama ini menjadi masalah serius dapat ditangani dengan teknologi tepat guna. Penanganan limbah yang sesuai dengan regulasi lingkungan akan berdampak positif terhadap pencapaian peringkat PROPER perusahaan sawit. ■





MEMPERCEPAT INOVASI DENGAN KONSORSIUM RISET

Yield gap di industri sawit tidak akan dapat ditutup tanpa riset dan inovasi.



Peningkatan produktivitas menjadi tantangan serius industri kelapa sawit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, di tengah kebutuhan yang semakin meningkat, produksi sawit justru stagnan di level 50-52 juta ton per tahun. Tantangan ini menjadi semakin berat karena terjadi di tengah tuntutan perubahan iklim, meningkatnya persaingan global, dan ancaman penyakit mematikan seperti busuk pangkal batang akibat jamur *Ganoderma*. Kalau tidak diantisipasi segera, kondisi ini akan berpengaruh terhadap daya saing sawit.

Sektor sawit masih potensial untuk ditingkatkan tanpa harus membuka lahan baru. Wilayah budidaya sawit sangat luas yang tersebar di banyak provinsi di Indonesia. Luas kebun sawit sampai tahun 2026 mencapai 16,8 – 17,3 juta hektar. “Sawit masih memiliki potensi peningkatan yang sangat besar,” kata Ketua Bidang Riset dan Pengembangan GAPKI Dwi Asmono di Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta pada 20 Juli 2026. Dia menyampaikan materi *Strategi Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia*.

Dwi Asmono mencontohkan potensi yang belum dioptimalkan. Produktivitas perkebunan sawit baru mencapai 62 persen dari potensi optimal. Sedangkan perkebunan rakyat sekitar 53 persen. Ada potensi peningkatan produksi hingga 30-40 persen yang belum dimanfaatkan. Salah satu penyebab utamanya adalah penerapan *best management practices* di kebun yang belum maksimal. “Kalau ini bisa tercapai secara sistematis paling tidak potensi dari CPO kita bisa naikan dua kali,” katanya.

Untuk memperkecil *yield gap* yang masih besar harus dilakukan dengan memperkuat riset dan inovasi. Namun, anggaran untuk riset sawit tidak sebesar untuk komoditas pertanian lainnya. Selain itu, investasi riset di Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal, riset sangat penting karena sawit bukan tanaman asli Indonesia. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang mengalokasikan dana besar untuk riset komoditas minyak nabati pesaing sawit. “Kita perlu membangun *platform* riset yang lebih terintegrasi dan kolaboratif,” katanya.

Untuk mempercepat riset dan inovasi GAPKI bersama pemangku kepentingan lainnya telah membentuk lima konsorsium riset. Masing-masing konsorsium berfokus pada berbagai aspek strategis pengembangan sawit. Lima konsorsium ini adalah Konsorsium Sumber Daya Genetik Sawit, Konsorsium Serangga Penyerbuk, Konsorsium Pengembangan Pupuk Hayati, Konsorsium Pengendalian *Ganoderma*, dan Konsorsium Mekanisasi, Digitalisasi, Otomasi,. Lima konsorsium ini sudah berjalan dan menghasilkan inovasi.

Contohnya, Konsorsium Sumber Daya Genetik yang telah mendistribusikan plasma nutfah generasi baru di Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 6 Mei 2026. Sumber daya genetik yang dilepas sebanyak 102 aksesi yang terdiri dari 76 aksesi tipe buah *Nigrescens*, 26 aksesi tipe buah *Virescens*, yang secara genetik komposisinya meliputi 84 aksesi tipe Dura dan 18 aksesi tipe Tenera. Sumber daya genetik dari Tanzania ini diproyeksikan dapat menghasilkan klon-klon baru yang lebih produktif.

Selain pelepasan plasma nutfah, konsorsium lainnya yakni Konsorsium Serangga Penyerbuk juga melakukan langkah strategis. Bersama pemangku kepentingan lainnya, GAPKI melepas tiga serangga penyerbuk baru yakni *Elaeidobius subvittatus*, *Elaeidobius kamerunicus*, dan *Elaeidobius plagiatus* di Sumatera Utara pada 9 April 2026. Seperti halnya plasma nutfah, tiga serangga penyerbuk juga berasal dari Tanzania. Serangga yang dilepas berasal dari hasil introduksi individu dewasa yang telah dikembangkan di Indonesia yakni 1.924 *E. subvittatus*, 1.697 *E. kamerunicus*, dan 1.359 *E. plagiatus*.

Sedangkan tiga konsorsium lainnya GAPKI juga melakukan berbagai langkah strategis. Saat ini, Konsorsium Mekanisasi, Digitalisasi, dan Otomasi (MDO) melakukan *benchmarking* ke beberapa perusahaan yang telah menerapkan mekanisasi, otomasi, dan digitalisasi. “Untuk pengembangan inovasi berbasis riset, kita memerlukan partner atau tenaga ahli,” kata Dwi Asmono. Dalam rapat koordinasi di Jakarta pada 12 Juni 2026, Konsorsium MOD berencana menggandeng Badan Teknik Kejuruan Pertanian Persatuan Insinyur Indonesia (BTKP-PII).

Selain BTKP-PII, beberapa *partner* juga sedang dijajaki untuk kerja sama dengan sejumlah skema antara lain riset inisiatif Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Penjajakan kerja sama lainnya dilakukan dengan skema *Grant Riset Sawit* BPDP. “Kita ingin mengoptimalkan implementasi hasil *Grant Riset Sawit* BPDP,” kata Dwi Asmono. Sedangkan BTKP-PII dapat berperan sebagai pendamping dalam implementasi hasil penelitian *Grant Riset Sawit* BPDP.

Menurut Dwi Asmono, konsorsium yang dibentuk oleh GAPKI diproyeksikan bukan sekadar menghasilkan penelitian, tetapi menciptakan inovasi yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan hasil panen yang lebih baik. Sebab, peningkatan panen satu

ton per hektar saja akan berdampak signifikan terhadap ekonomi. Dia menegaskan bahwa *yield gap* tidak akan dapat ditutup tanpa riset dan inovasi.

“Riset dan inovasi adalah investasi strategis industri sawit untuk masa depan,” katanya.

Oleh karena itu, riset dan inovasi membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan di industri

sawit. Kerja sama yang terdiri dari dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan dukungan pemerintah melalui pendanaan riset menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Dengan produktivitas yang semakin baik, daya saing CPO semakin tinggi dan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia bertahan secara berkelanjutan. ■

LIMA KONSORSIUM RISET

GAPKI dan pemangku kepentingan lain membentuk lima konsorsium untuk percepatan inovasi di industri sawit. Lima konsorsium itu adalah:

1. Konsorsium Sumber Daya Genetik Sawit

Berfokus pada pengayaan plasma nutfah global sebagai fondasi varietas unggul baru yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

2. Konsorsium Serangga Penyerbuk

Berfokus pada pengembangan serangga penyerbuk atau *pollinator insects* untuk regenerasi kompleks *polinator* guna meningkatkan kualitas *fruit set* dan rendemen.

3. Konsorsium Pengendalian Ganoderma

Berfokus pada pengembangan pendekatan terpadu mulai dari pemuliaan tanaman hingga pengendalian hayati untuk mencegah penyakit BSR (*Basal Stem Rot*)

4. Konsorsium Pengembangan Pupuk Hayati

Berfokus pada pengembangan *biofertilizer* sebagai substitusi atau mengurangi pemakaian pupuk sintetis sekaligus untuk meningkatkan kesehatan tanah.

5. Konsorsium Mekanisasi, Digitalisasi dan Otomasi

Berfokus pada pengembangan teknologi perkebunan modern yang efisien, menerapkan *best practices management* untuk hasil produksi yang lebih baik.



SAWIT MEMBUTUHKAN EKOSISTEM RISET BERKELANJUTAN

“Ganoderma adalah contoh riset terapan yang sangat dibutuhkan,” kata Eddy Martono.

GAPKI menandatangani Komitmen Bersama untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan melalui program beasiswa sawit. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono bersama Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman, dan Plt Dirjen Perkebunan Heru Tri Widarto pada Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 di Jakarta, 20-21 Juli 2026. Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri guna mencetak SDM yang unggul.

Komitmen Bersama juga bertujuan mendorong lahirnya riset yang memberi solusi konkret atas berbagai tantangan perkebunan sawit. Salah satunya adalah penyakit busuk pangkal batang akibat jamur Ganoderma. “Ganoderma adalah contoh riset terapan yang sangat dibutuhkan,” kata Eddy Martono. Riset ini diharapkan menghasilkan teknologi yang mampu mendeteksi jamur Ganoderma sekaligus sanggup mengendalikannya. Penelitian Ganoderma dibutuhkan karena penyakit ini mulai menyerang tanaman hasil peremajaan generasi awal.

Dalam Komitmen Bersama, ketiga pihak mendukung program beasiswa melalui sosialisasi, penyebaran informasi, fasilitasi calon penerima beasiswa, hingga penguatan

keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Dalam hal ini, GAPKI akan memfasilitasi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk magang, kurikulum, hingga materi praktik kerja lapangan (PKL) melalui perusahaan anggota GAPKI. “Peneliti dan mahasiswa perlu melihat kebutuhan industri terlebih dahulu agar risetnya tepat sasaran,” katanya.

Menurut anggota Bidang Pengembangan SDM GAPKI, Bagus Setiagung, kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri sawit masih terasa. “Kita selalu bicara tentang *link and match*, tetapi tidak pernah ditanyakan perusahaan butuhnya apa,” kata Bagus dalam presentasi tentang Penguatan *Link & Match SDM Hilirisasi untuk Meningkatkan Daya Saing* di kegiatan PERISAI 2026. Industri sawit sebenarnya menyediakan lapangan kerja yang cukup besar bagi lulusan perguruan tinggi.

Dengan luas kebun sawit nasional sekitar 17,1 juta hektare pada 2025, kebutuhan tenaga profesional terus bertambah. Apabila menggunakan rasio sederhana satu asisten untuk setiap 1.000 hektare, industri sawit membutuhkan 17.200 orang asisten kebun. Angka ini belum memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja pada level manajerial atau pendukung lainnya. Masalah ini tidak mungkin diselesaikan dengan menambah jumlah lulusan, tetapi dengan memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri.

Sampai saat ini, industri sawit

telah menyerap 9,7 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Sekitar 4,5 juta orang bekerja di perkebunan besar negara dan swasta, sedangkan 5,2 juta orang lainnya adalah pekebun. Jumlah lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan setiap tahun diperkirakan sekitar 1.000 orang, sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM masih cukup lebar. Untuk menutupi kekurangan, salah satu jalan yang ditempuh industri adalah mengembangkan *learning center* atau *learning academy* sendiri.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM sawit, BPDP bekerja sama dengan 44 kampus dan memberikan beasiswa kepada 13.265 mahasiswa, serta melatih lebih dari 30 ribu petani serta pekebun guna mempercepat adopsi inovasi di lapangan. Beasiswa diberikan terutama kepada keluarga pekerja di sektor perkebunan sawit. Begitu juga dengan riset untuk pengembangan industri.

Untuk riset, BPDP memberikan dukungan berupa program Grant Riset Sawit (GRS) sejak tahun 2015. Sampai saat ini BPDP telah mendukung 466 kontrak riset yang melibatkan 109 lembaga penelitian dan pengembangan, 1.873 peneliti, dan 383 mahasiswa. Program ini menghasilkan 395 publikasi ilmiah dan 84 paten. Pada tahun 2026, BPDP menyepakati 56 kontrak riset baru, termasuk pengembangan kelapa nasional dan kesiapan penerapan B50. ■



PERLINDUNGAN PEKERJA KUNCI KEBERLANJUTAN INDUSTRI SAWIT

“Lebih dari 70 persen peserta BPJS Ketenagakerjaan berasal dari sektor perkebunan sawit.”

Industri sawit menghadapi satu tantangan dalam menjalankan program perlindungan tenaga kerja. Tantangan itu adalah tingginya tingkat pergantian pekerja serta keberadaan pekerja harian atau pekerja sementara dengan masa kerja pendek. Secara prinsip mereka mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tetapi, implementasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jaminan yang sama juga berlaku untuk pekerja di daerah terpencil yang jauh dari akses fasilitas jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan.

Tema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini menjadi fokus pembahasan antara GAPKI Kalimantan Barat dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak pada 3 Juni 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua GAPKI Kalbar Aris Supratman, Dewan BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Suhuri. Pertemuan ini membahas penguatan perlindungan pekerja perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Aris Supratman mengatakan pertemuan ini mengkaji strategi meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sawit. Pertemuan ini sekaligus untuk memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perkebunan kelapa sawit. “Perlindungan pekerja sangat penting karena menjadi bagian dari tercapainya keberlanjutan industri sawit,” katanya.

Menurut dia, keberlanjutan industri kelapa sawit tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produktivitas dan produksi.



Komitmen perusahaan sawit dalam memberikan perlindungan kepada pekerja menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Program jaminan sosial ini bertujuan membangun hubungan industrial yang harmonis sebagai fondasi dalam menciptakan keberlanjutan industri sawit.

Komitmen GAPKI dalam perlindungan jaminan sosial pekerja sudah dilaksanakan dengan baik. Mayoritas anggota GAPKI telah mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah tingkat pergantian pekerja yang masih tinggi dan keberadaan tenaga kerja harian atau tenaga kerja sementara dengan masa kerja pendek. “Kita terus mencari solusi yang efektif dan dapat diterapkan oleh perusahaan sawit,” katanya.

Sampai saat ini, pekerja di sektor sawit berkontribusi besar terhadap jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan secara nasional. “Lebih dari 70 persen peserta BPJS Ketenagakerjaan berasal dari sektor perkebunan sawit,” kata Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih. Masifnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dari perkebunan sawit tidak lepas dari luasnya kebun sawit di Indonesia yang mencapai 16,7 juta hektar. Selain itu, banyak perkebunan sawit beroperasi di wilayah terpencil.

“Hal ini menjadi perhatian khusus dalam upaya meningkatkan layanan dan memperluas kepesertaan pekerja di perkebunan sawit,” kata Sumarjono

Saragih. Apalagi perlindungan sosial jaminan ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja perusahaan perkebunan, tetapi juga pekerja informal sektor sawit seperti petani sawit, sopir angkutan tandan buah segar, hingga buruh bongkar muat.

BPJS Ketenagakerjaan mendorong penguatan program K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Kalimantan Barat diharapkan menjadi percontohan dalam penguatan perlindungan pekerja sektor sawit di Indonesia. Karena itu, komunikasi dan sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan harus diperkuat.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Suhuri mengatakan sinergi dengan GAPKI menjadi langkah penting memastikan seluruh pekerja sawit memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. “Sawit adalah sektor strategis yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga membutuhkan perlindungan yang memadai,” katanya. ■



PONTIANAK

KAMPANYE POSITIF

SAATNYA, KREATOR KONTEN MUDA BICARA SAWIT

Generasi muda harus menjadi digital advocate yang memahami sawit sebelum bersuara.

Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI, Edi Suhardi memberikan pembekalan tentang sawit kepada peserta *STORY 2026: Sawit Creator Academy Ekspedisi Aceh* yang diselenggarakan oleh Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI) di kampus Politeknik Venezuela Indonesia (Poliven) pada 22 Juli 2026. *STORY* adalah wadah pengembangan generasi muda menjadi kreator dan komunikator sawit yang kritis, kreatif, serta mampu menyampaikan informasi secara positif dan bertanggung jawab.

STORY terdiri dari tiga rangkaian yakni *STORY Talkshow*, *STORY Workshop*, dan *STORY Challenge & Awarding*. *STORY 2026* mengangkat



tema *Dari Serambi Mekah Kita Bersuara, untuk Citra Baik Sawit Indonesia* dengan tagline *Muda Berkarya, Sawit Bersuara*. Kegiatan ini mengangkat tiga isu utama, yakni sawit baik, kesejahteraan petani, dan pengembangan ekonomi daerah. “Generasi muda dapat mengambil peran dalam membangun komunikasi tentang sawit,” kata Edi Suhardi.

Edi Suhardi mendorong generasi muda tidak sekadar menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi *digital advocate* yang memahami substansi komoditas kelapa sawit sebelum berbicara di ruang publik. Konten digital yang diproduksi harus kredibel, bertanggung jawab, dan berdasarkan fakta. Oleh karena itu, generasi muda perlu mendapatkan perspektif yang lengkap tentang sawit dari pelaku industri maupun petani. Untuk perspektif petani, peserta mendapatkan pembekalan dari perwakilan APKASINDO.

Pembekalan tentang perspektif petani meliputi keberadaan petani sawit, hubungan antara petani dan industri kelapa sawit, kesejahteraan petani, dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan memahami dua perspektif ini, peserta diajak mengenali ekosistem industri kelapa sawit secara lebih komprehensif, mulai dari aspek industri hingga kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan.

Kegiatan yang diikuti oleh generasi

muda ini cukup menarik karena berkolaborasi dengan REGENERASI Malaysia. REGENGASI adalah lembaga swadaya masyarakat yang berdedikasi untuk mendidik dan memberdayakan pemuda Malaysia di bidang regenerasi, ketahanan pangan dan keberlanjutan. Vice President Youth Council REGENERASI Malaysia, Khairul Amirin Khairudin membahas regenerasi industri sawit dan pengembangan kepemimpinan secara virtual. Dia mendorong kolaborasi pemuda sawit di kawasan ASEAN. Sebab, industri sawit Malaysia mulai melibatkan generasi muda melalui sejumlah kegiatan positif.

Ketua Umum APMI Muhammad Nur Fadillah mengatakan generasi muda memiliki posisi strategis di tengah derasnya arus informasi di media digital. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan memahami isu dan mengkomunikasikannya kepada publik secara tepat. *STORY 2026* membekali generasi muda dengan literasi digital, komunikasi publik, serta penyusunan narasi sawit yang berbasis fakta.

Melalui kegiatan ini, peserta *STORY 2026* mendapat pengetahuan melalui *workshop*, *talkshow*, dan kompetisi video sehingga mampu menyampaikan informasi tentang sawit dengan bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang mereka sampaikan bisa disalurkan melalui berbagai digital *platform* yang menjadi bagian dari aktivitas mereka sehari-hari. ■



MEMPERKUAT PENCEGAHAN KARHUTLA DI LAHAN GAMBUT

Kandungan bahan organik yang tinggi dan material menyerupai kayu membuat gambut lebih mudah terbakar.

Lahan gambut menjadi perhatian serius pemerintah dan perusahaan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena sifatnya yang mudah terbakar. Kandungan bahan organik yang tinggi dan material gambut yang menyerupai kayu membuatnya lebih mudah terbakar. Oleh karena itu, pencegahan karhutla yang melibatkan masyarakat melalui Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan dukungan penuh perusahaan yang memiliki izin beroperasi di lahan gambut.

Pencegahan karhutla di lahan gambut ini dipresentasikan oleh Ketua Bidang Sustainability GAPKI, Bambang Dwi Laksono dalam rapat *Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut* di Jakarta, 10 Juli 2026. Rapat ini diikuti oleh 400 perusahaan yang mengelola konsesi, dan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup. Jumlah peserta rapat yang banyak mencerminkan skala dan urgensi pencegahan kebakaran lahan gambut.

GAPKI menegaskan komitmennya dalam mendukung program DMPG yang memiliki tiga fokus utama yakni *rewetting*, revegetasi, dan revitalisasi. *Rewetting* dilakukan melalui pengelolaan air dan pembasahan lahan dengan membangun sekat kanal. Revegetasi dilakukan melalui penanaman kembali lahan dengan

tanaman lokal yang bernilai ekonomi. Revitalisasi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, menjaga kelembapan tanah menjadi faktor kunci yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Menurut Bambang Dwi Laksono, sebagian besar penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah faktor manusia seperti membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang belum menyadari potensi kebakaran akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan secara bersama oleh perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. “Jadi, ini soal perilaku, disiplin, dan komitmen,” katanya. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

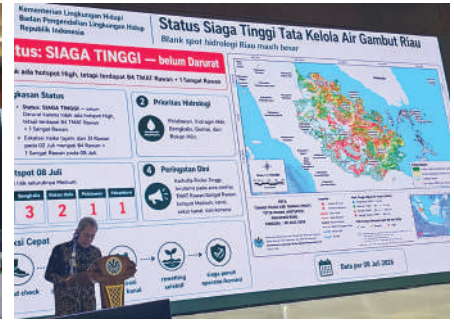
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbandi menegaskan bahwa perusahaan pemegang konsesi wajib memperkuat langkah pencegahan karhutla, khususnya di kawasan gambut. “Instruksinya jelas, kebakaran tidak boleh terjadi di dalam wilayah konsesi,” katanya. Salah satu langkah utama untuk pencegahan adalah menjaga tinggi muka air tanah di area gambut melalui pengendalian kanal dan *rewetting*. Langkah ini dilakukan dengan membangun kanal agar air tidak cepat mengalir keluar dari area

gambut.

Pemerintah memperkirakan lebih dari 20.000 tindakan pengelolaan kanal atau pembasahan kembali diperlukan selama beberapa bulan ke depan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Perusahaan diminta berperan dalam pencegahan kebakaran hingga radius lima kilometer dari batas wilayah usahanya melalui kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. “Kawasan kering di luar konsesi juga dapat memicu kebakaran yang merambat ke wilayah perusahaan,” katanya.

Menyikapi permintaan Kementerian Lingkungan Hidup, sejumlah perusahaan pemegang konsesi menyatakan berkomitmen menjaga ekosistem gambut melalui pengelolaan tata air dan pemulihan fungsi hidrologi di kawasan penyangga. Pencegahan karhutla juga dilakukan melalui *water sharing* dan restorasi fungsi hidrologis ekosistem gambut bersama seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan ekosistem gambut sekaligus mencegah karhutla. Kementerian KLH mencatat hingga saat ini sebanyak 413 perusahaan telah melakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di ekosistem gambut. ■



MINYAK SAWIT UNTUK MEDIS MENDAPATKAN PENGECCUALIAN EUDR

Sejumlah produk dikecualikan dari EUDR setelah Komisi Eropa menggelar konsultasi publik.

Komisi Eropa telah dua kali menunda penerapan Undang-Undang Anti-Deforestasi (EUDR) dari semula 30 Desember 2024, lalu direncanakan pada 30 Desember 2025, dan menjadi 30 Desember 2026 untuk perusahaan menengah dan besar. Sedangkan untuk usaha mikro dan kecil akan diberlakukan mulai 30 Juni 2027.

Komisi Eropa beralasan penundaan ini untuk memberikan kesempatan kepada negara dan produsen produk yang termasuk dalam aturan EUDR dapat menyiapkan diri.

Selama masa transisi, Komisi Eropa mengamandemen sejumlah ketentuan, salah satunya mengecualikan produk turunan minyak sawit untuk kebutuhan medis. Tujuannya untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan. Selain itu, kedelai untuk bibit juga dikecualikan dalam Undang-Undang Anti-Deforestasi. Pengecualian ini tidak lepas dari hasil konsultasi publik Komisi Eropa yang berakhir pada 1 Juni 2026.

Berdasarkan publikasi laman *euractiv.com* berjudul *EU to extend deforestation law to palm-derived chemicals* edisi 29 Juni 2026 disebutkan ada sejumlah produk di sektor kesehatan yang membutuhkan minyak sawit. Produk itu antara lain obat berbahan dasar gliserin dari minyak sawit serta pembalut luka dan plester. Minyak sawit yang digunakan untuk produk pembersih tangan seperti hand sanitizer, sabun, sampo, salep, atau krim disebutkan juga dipertimbangkan masuk dalam pengecualian EUDR.

Komisi Eropa memandang minyak sawit untuk produk kesehatan jumlahnya tidak signifikan sehingga dikeluarkan dari ketentuan EUDR. Begitu juga kedelai untuk bibit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Selain minyak sawit untuk produk kesehatan, laman *euractiv.com*

juga menyebutkan Komisi Eropa akan mengecualikan minyak sawit dalam bentuk limbah untuk bahan baku biofuel dalam ketentuan Undang-Undang Anti-Deforestasi. Seperti halnya untuk produk kesehatan, volume minyak sawit untuk biofuel masih relatif kecil.

Pembaruan legislatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa, juga menetapkan produk kulit masih mendapatkan pengecualian dari EUDR. Namun, ketentuan ini akan ditinjau ulang pada tahun 2030. Sedangkan produk baru yang masuk dalam pengecualian EUDR adalah kursi pesawat terbang, kursi kendaraan bermotor, dan ban berjalan (*conveyor belts*). Pengecualian untuk produk kursi dan ban tidak berlaku selamanya karena dan diberikan penundaan sampai satu tahun ke depan hingga akhir tahun 2027.

Komisi Eropa menyatakan perubahan dalam rancangan EUDR bertujuan untuk memastikan konsistensi di seluruh rantai pasok dan mencegah korporasi mengalihkan risiko deforestasi ke produk hilir yang belum tercakup dalam regulasi. Komisi Eropa juga menegaskan bahwa produksi daging sapi olahan, kulit, dan sekam kakao tetap tercakup dalam ruang lingkup aturan ini berdasarkan penilaian biaya-manfaat yang telah dilakukan.

Rencana Uni Eropa memberlakukan EUDR sejak tahun 2023 mendapatkan protes keras dari negara-negara penghasil sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Kasus ini sampai dibawa ke sidang WTO (World Trade Organization). WTO memenangkan gugatan Indonesia terkait kebijakan Bea Imbalan (*countervailing duties*) terhadap produk biodiesel asal Indonesia pada tahun 2025. WTO menegaskan Uni Eropa terbukti bersikap diskriminatif terhadap produk turunan sawit dari Indonesia. ■

JALAN PANJANG KEBIJAKAN EUDR

Desember 2022

Parlemen dan Dewan Uni Eropa menyepakati kebijakan tentang EUDR.

Mei 2023

Komisi Eropa mengesahkan EUDR dan berlaku per akhir Desember 2024.

Agustus 2023

Indonesia dan Malaysia gugat Uni Eropa ke WTO soal EUDR.

Desember 2024

Komisi Eropa menunda implementasi EUDR selama satu tahun.

Desember 2025

Uni Eropa mengesahkan penundaan implementasi kebijakan EUDR.

Desember 2026

Implementasi EUDR untuk usaha besar dan menengah.

Juli 2027

Implementasi EUDR untuk usaha mikro dan kecil.



MENYIAPKAN KETERAMPILAN PEKERJA UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI

Potensi besar sawit membutuhkan dukungan keterampilan pekerja yang memadai.

Industri sawit berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui produk yang dihasilkan dan penyerapan tenaga kerja. Komoditas ekspor andalan Indonesia ini juga memiliki peran penting dalam pengembangan energi terbarukan. Bahkan, sawit berpotensi besar dalam transisi menuju energi terbarukan. Potensi ini membutuhkan dukungan keterampilan tenaga kerja yang memadai. Kompetensi pekerja sektor sawit ini akan berdampak besar terhadap transformasi ekonomi dari industri sawit.

Pentingnya keterampilan pekerja sawit ini terungkap dalam kegiatan *Validasi Hasil Konsultasi Nasional Penyusunan Peta Jalan Keterampilan untuk Transformasi Ekonomi*. Kegiatan yang diadakan oleh ILO Indonesia memaparkan hasil kajiannya di Sumatera Selatan sejak Agustus 2025. Selain itu, kajian juga dilakukan di Kalimantan Timur sejak Januari 2026. Hasil kajian ini dipaparkan dihadapan perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, GAPKI, Bappenas, Kemenaker, dan organisasi serta serikat pekerja. GAPKI diwakili oleh Eko Tamba.

“Hasil kajian dan lokakarya ini memberi masukan dan umpan balik berharga tentang profil pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan di tiga sektor ekonomi,” kata Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatih Kementerian Ketenagakerjaan Teguh Djatmiko. Tiga sektor ekonomi yang sedang berkembang ini adalah pariwisata, komoditas kopi, dan minyak sawit. Kegiatan yang diadakan di Bandung pada 11-12 Juni 2026 ini diharapkan menjadi panduan bagi pemangku kepentingan tiga sektor ini



dalam mengembangkan keterampilan pekerjaannya.

Dari hasil penelitan ILO Indonesia, komoditas sawit menjadi sektor strategis di Kalimantan Timur karena mendominasi sektor perkebunan. Jumlah pekerja yang terserap sektor ini sangat besar sehingga berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Kontribusi sektor sawit juga signifikan terhadap energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa atau limbah cair sawit (*Palm Oil Mill Effluent/POME*). Potensi ekonomi dan energi terbarukan ini akan berdampak lebih besar jika didukung keterampilan tenaga kerja yang memadai.

Namun, potensi besar komoditas sawit di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan besar antara lain produktivitas yang masih rendah, keterbatasan pabrik pengolahan sawit, legalitas lahan, dan kekurangan tenaga teknis. Kekurangan tenaga teknis bukan hanya untuk pengembangan energi terbarukan, tetapi juga praktik budidaya yang baik. Bimbingan teknis sangat diperlukan untuk mendorong pekebun meningkatkan kemampuannya dalam praktik terbaik

budidaya tanaman.

Untuk merespon hasil temuan tersebut, ILO Indonesia mendorong peremajaan sawit dapat ditingkatkan karena akan berdampak terhadap produksi di masa depan. Peremajaan berlaku untuk semua kebun sawit. Selain itu, sejalan dengan pencapaian target energi terbarukan, sertifikasi ISPO maupun RSPO harus diperluas mencakup seluruh kebun yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sertifikasi ISPO maupun RSPO akan berkorelasi positif dengan pencapaian misi keberlanjutan industri sawit.

Teguh Djatmiko mengatakan berdasarkan temuan ILO Indonesia, industri sawit secara umum sudah waktunya memasuki tahapan mekanisasi dan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk operasional kebun yang efektif dan efisien. “Penguatan kelembagaan petani juga menjadi faktor vital dalam mendukung keterampilan pekerja di sektor sawit,” katanya. Hasil lokakarya ini diharapkan menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan sektor sawit untuk keberlanjutan sawit di masa depan. ■



GAPKI KALBAR PERTEGAS DUKUNGAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI NASIONAL

Kalimantan Barat adalah penghasil utama sawit dengan luas kebun 2,9 juta hektar.

Sebagai daerah penghasil sawit utama di Indonesia, Kalimantan Barat berperan signifikan dalam keberhasilan program ketahanan pangan dan energi nasional. Hal ini tidak lepas dari luas perkebunan sawit di Kalimantan Barat yang mencapai 2,9 juta hektar. Oleh karena itu, GAPKI Cabang Kalimantan Barat menegaskan dukungan terhadap program ketahanan pangan dan energi nasional. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) GAPKI Kalimantan Barat di Pontianak pada 25 Juni 2026.

Rapat ini dihadiri oleh pengurus GAPKI Kalbar, pengurus GAPKI Pusat, unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akademisi, dan para pemangku kepentingan sektor sawit. Tema yang diangkat dalam rapat ini adalah *Memperkuat Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi Nasional*.

Ketua GAPKI Kalimantan Barat, Aris Supratman mengatakan industri sawit tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Serapan tenaga kerja cukup besar sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peranan sektor sawit Kalimantan Barat juga cukup besar terhadap program pemerinah pusat. Potensi komoditas ini sangat besar sehingga harus dikelola dengan baik mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan. Begitu

juga dengan peningkatan produktivitas yang menjadi tantangan besar industri ini.

"Program mandatori biodiesel menjadi bukti nyata kontribusi sawit dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," katanya. Selain sebagai sumber energi terbarukan, industri sawit berkontribusi besar dalam penyediaan minyak nabati, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono dalam sambutan Rakercab mengatakan industri sawit tetap menjadi sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan tekanan perdagangan internasional, Indonesia berpeluang mempertahankan dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri minyak sawit dunia.

Sejalan dengan keputusan pemerintah yang menerapkan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026, akan ada peningkatan kebutuhan minyak sawit di dalam negeri. Kondisi ini menjadi peluang baru bagi pertumbuhan industri sawit nasional. "Namun, peningkatan permintaan ini harus diimbangi dengan kesiapan

produksi, pasokan bahan baku, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan," katanya.

Isu strategis ini menjadi pembahasan Rakercab GAPKI Kalbar sehingga program organisasi selaras dengan kebutuhan kondisi terkini. Oleh karena itu, GAPKI mendorong lahirnya kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, keberlanjutan industri, dan kepastian berbisnis bagi para pelaku usaha. Kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai pihak akan menjadi fondasi penting keberlanjutan industri sawit.

Selain itu, Rakercab GAPKI Kalbar juga mengingatkan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Perusahaan anggota GAPKI diwajibkan memperkuat sistem pencegahan, pemantauan, serta koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Dalam perhelatan ini, GAPKI juga meresmikan kantor GAPKI Kalbar yang baru sebagai pusat koordinasi dan kolaborasi industri sawit di Kalbar. Selain itu, GAPKI Kalbar juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini dalam rangka memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan riset di sektor perkebunan. ■

GAPKI SULAWESI INISIASI PENINGKATAN KUALITAS SDM SAWIT

Saat ini industri tidak hanya membutuhkan lulusan agronomi dan budidaya tanaman.

GAPKI Cabang Sulawesi mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sawit melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kerjasama dengan kampus dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor sawit yang semakin beragam. Pentingnya SDM berkualitas ini disampaikan oleh Ketua GAPKI Sulawesi Dony Yoga Perdana dalam kegiatan *GAPKI Goes to Campus* di Universitas Alkhairaat Palu pada 12 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Unisa Muhammad Yasin, mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

Menurut Dony, saat ini industri tidak hanya membutuhkan lulusan agronomi dan budidaya tanaman, tetapi juga tenaga profesional di bidang lingkungan, teknologi informasi, manajemen, keuangan, logistik, dan keberlanjutan. "Industri kelapa sawit adalah sektor yang sangat luas dan memberikan banyak peluang karir bagi generasi muda," katanya. Dia memaparkan materi bertajuk *Mengenai Kebutuhan Kompetensi SDM Industri Kelapa Sawit*.

Peluang karir di industri sawit semakin banyak karena industri ini berkembang sangat pesat. Selain kemampuan teknis, perusahaan juga membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan bekerja dalam tim.

Oleh karena itu, mahasiswa harus mengantisipasi kebutuhan industri sawit dengan meningkatkan kompetensi supaya dapat bersaing dan berkontribusi dalam perkembangan industri sawit dalam negeri.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, Dony menjelaskan industri dari aspek operasional, budidaya tanaman, regulasi, hingga kontribusi sawit terhadap perekonomian Indonesia. "Industri sawit juga berkomitmen dalam aspek keberlanjutan dalam setiap operasinya," katanya. Oleh karena itu, industri sawit beroperasi berdasarkan tata kelola industri yang baik untuk memenuhi standar keberlanjutan di tingkat nasional dan internasional. "Industri sawit juga sangat *concern* dengan isu-isu lingkungan," katanya.

Rektor Universitas Alkhairaat Palu, Muhammad Yasin mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan *GAPKI Goes to Campus* oleh GAPKI. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha merupakan langkah penting menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "Kami sangat terbuka untuk menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan GAPKI," katanya. Kerjasama bisa dalam bentuk program magang mahasiswa, riset, pengembangan kompetensi, dan peluang rekrutmen pekerja.

Menurut dia, perguruan tinggi tidak dapat bekerja sendiri dalam menyiapkan sumber daya manusia



yang siap bersaing. Karena itu, sinergi dengan industri diperlukan agar mahasiswa memperoleh pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. "Mahasiswa memang perlu diberikan pengalaman langsung di lapangan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah," kata Yasin.

Senada, Dony juga mengatakan melalui *GAPKI Goes to Campus* mahasiswa diharapkan bisa memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang industri sawit. Dengan wawasan yang lebih baik mereka akan melihat industri ini sebagai salah satu bidang yang memiliki prospek besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Program ini juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan GAPKI dalam mencetak SDM unggul, kompeten, dan siap memasuki dunia kerja di era transformasi yang semakin dinamis. ■



GAPKI BENGKULU PERKUAT KONSOLIDASI ORGANISASI

Rakercab ini merupakan rapat kerja pertama GAPKI Bengkulu periode 2026-2031.

GAPKI Cabang Bengkulu diminta memperkuat konsolidasi organisasi untuk menghadapi tantangan industri sawit yang semakin besar. Soliditas organisasi merupakan fondasi untuk menjalankan program kerja dan menghadapi tantangan. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) GAPKI Bengkulu di Bengkulu pada 12 Juni 2026. Rapat ini merupakan Rakercab pertama setelah terbentuknya kepengurusan GAPKI Bengkulu periode 2026-2031 pada Maret 2026 yang lalu. Rakercab ini dihadiri oleh 15 orang yang mewakili 10 perusahaan anggota GAPKI Bengkulu.

“Tantangan yang kita hadapi sekarang antara lain ketidakpastian global, kondisi geopolitik, perubahan iklim, dan tekanan perdagangan internasional,” kata Eddy Martono. Selain itu, tantangan juga datang dari dalam negeri yang mencakup biaya produksi, regulasi, hingga produktivitas tanaman. Di tengah tantangan besar ini, industri sawit punya tanggung jawab dalam mendukung program ketahanan pangan dan energi serta menjadi penopang penting perekonomian nasional.

Menurut Eddy Martono, Bengkulu merupakan salah satu daerah penghasil sawit penting di Sumatera. Kontribusinya cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja,

penyediaan bahan pangan, energi dan produk oleokimia. “Industri sawit masih menjadi pendorong ekonomi daerah,” katanya. Semakin tinggi produktivitas sawit, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, GAPKI mendorong peningkatan produksi dapat dilakukan tanpa perluasan lahan.

Secara khusus, ketua umum meminta pengurus GAPKI Bengkulu untuk memperhatikan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Apalagi musim kemarau diperkirakan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober 2026. Langkah antisipatif seperti sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan harus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua GAPKI Cabang Bengkulu Anwar Jibe mengatakan konsolidasi organisasi akan diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program kerja. Rencana kerja yang akan dijalankan disesuaikan dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GAPKI pada Mei 2026 di Solo, Jawa Tengah. “Rakercab adalah forum strategis dan konstitusional organisasi untuk mengevaluasi program kerja dan merumuskan arah kebijakan organisasi,” katanya. Karena itu,



koordinasi dan komunikasi akan ditingkatkan sebagai dasar konsolidasi organisasi.

Menurut Anwar Jibe, program kerja yang menjadi fokus perhatian antara lain memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola usaha yang baik, keberlanjutan lingkungan, dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Tiga program kerja ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan internal dan eksternal organisasi. Kemampuan menjalankan tiga program kerja ini akan berdampak terhadap rencana kerja yang lainnya.

Selain itu, GAPKI Bengkulu tetap melanjutkan beberapa program sebelumnya yang sedang berjalan seperti sosialisasi klinik ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan pendataan sertifikasi ISPO anggota GAPKI. Sertifikasi ini bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian keberlanjutan industri sawit. “GAPKI Bengkulu akan memperkuat bimbingan teknis budidaya sawit dan pengendalian hama penyakit,” katanya. Anwar Jibe mengatakan program kerja dalam Rakercab menjadi panduan untuk perjalanan organisasi satu tahun ke depan. ■

